PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

UNIT KERJA : **PIMPINAN TERTINGGI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGIONO**
2. Jabatan : **MENTERI LUAR NEGERI RI**
3. NHK : **675270**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.564.000.000**

1. Tanah Seluas 2756 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 6.890.000.000
2. Bangunan Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
3. Bangunan Seluas 120 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 596 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 894.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.400.000.000**

1. MOBIL, JEEP RUBICON Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA GL1800DK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 510.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 2.256.976.184**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**12.730.976.184**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**12.730.976.184**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.